

Katalog : 4301003.3308



# PROFIL PENDIDIKAN KABUPATEN MAGELANG

# 2019



BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MAGELANG



# PROFIL PENDIDIKAN KABUPATEN MAGELANG

# 2019

---

# **PROFIL PENDIDIKAN KABUPATEN MAGELANG 2019**

No ISBN : 978-623-94353-1-8

No. Publikasi : 33080.2036

Katalog : 4301003.3308

Ukuran Buku : 14,8 x 21,0 cm

Jumlah Halaman : viii + 40 Halaman

**Naskah:**

BPS Kabupaten Magelang

**Penyunting :**

BPS Kabupaten Magelang

**Gambar Kulit :**

BPS Kabupaten Magelang

**Diterbitkan oleh :**

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

**Dicetak oleh :**

-

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

## KATA PENGANTAR

Profil Pendidikan Kabupaten Magelang 2019 merupakan salah satu publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang. Publikasi ini memberikan gambaran umum tentang kondisi pendidikan masyarakat di Kabupaten Magelang. Data yang digunakan dalam publikasi ini merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2019.

Publikasi ini menyajikan informasi mengenai kondisi dan perkembangan pendidikan di Kabupaten Magelang. Data yang disajikan mencakup beberapa aspek kegiatan pendidikan, yang diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya publikasi ini, disampaikan terima kasih. Saran yang membangun dan masukannya untuk perbaikan publikasi serupa di masa datang sangat diharapkan.

Kota Mungkid, Oktober 2020  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Magelang



Ir. Sri Wiyadi, M

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	2
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Sistematika Penyajian.....	4
<b>BAB II METODOLOGI</b>	
2.1 Sumber Data.....	6
2.2 Metode Pengumpulan Data.....	6
2.3 Metode Analisis.....	6
2.4 Konsep Definisi.....	7
<b>BAB III PARTISIPASI PENDIDIKAN</b>	
3.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....	13
3.2 Partisipasi Sekolah.....	16
3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	19
3.4. Angka Partisipasi Kasar (APK).....	21
3.5 Angka Partisipasi Murni (APM).....	22
<b>BAB IV PEMBANGUNAN PENDIDIKAN</b>	
4.1 Angka Melek Huruf.....	26
4.2 Rata-rata Lama Sekolah .....	28
4.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	30

**BAB V SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN**

5.1 Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Guru.....35  
5.2 Rasio Sekolah Guru, Sekolah Murid dan Guru Murid.....36  
**PENUTUP**.....40

<https://magelangkab.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

Halaman

3.1	Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah dan Kelompok Umur di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2019.....	14
3.2	Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2019.....	15
3.3	Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas dan Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2019.....	17
3.4	Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas dan Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2019.....	18
3.5	APS Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2019.....	20
4.1	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke atas dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2019.....	31
5.1	Jumlah Sekolah, Murid, Guru di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2019.....	35
5.2	Rasio Jumlah Sekolah, Murid, Guru di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2019.....	37

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1	Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2019..... 22
Gambar 3.2	Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2019..... 23
Gambar 4.1	Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2019..... 27
Gambar 4. 2	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (tahun) di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2019 ..... 29



# BAB I PENDAHULUAN



Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan, upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan, upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Selain memberi kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi, pendidikan juga menetaskan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, serta dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Dalam mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, Negara menyelenggarakan program wajib belajar untuk pendidikan dasar. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi

dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Salah satu langkah pemerintah untuk mensinergikan program-program pendidikan agar tepat sasaran antara lain dengan adanya program Pendidikan Untuk Semua (PUS). Sasaran program Pendidikan Untuk Semua antara lain adalah Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pemberantasan Buta Huruf, Pendidikan Kecakapan Hidup, Penduduk Kesetaraan dan Keadilan Gender, dan Peningkatan Mutu Pendidikan.

Untuk mengukur dan menentukan arah kebijakan pemerintah, khususnya dibidang pendidikan, saat ini, tidak hanya pemerintah di level pusat saja tetapi juga pemerintah daerah sudah semakin membutuhkan data yang terkait dengan pendidikan seperti angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni, angka melek huruf. Indikator-indikator tersebut merupakan ukuran-ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan pendidikan.

Latar belakang dari penulisan publikasi ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang data pendidikan dengan mendeskripsikan angka-angka statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk membuat angka-angka tersebut menjadi lebih menarik dan mudah dibaca oleh para pengguna data dan pada akhirnya dapat dipahami khususnya oleh para pengambil keputusan serta oleh masyarakat luas.

## **1.2 Tujuan**

Secara umum penulisan Publikasi Profil Pendidikan Kabupaten Magelang 2019 ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Magelang. Kondisi dan perkembangan pendidikan dalam publikasi ini akan dilihat dari tiga aspek, yaitu: partisipasi pendidikan, pembangunan pendidikan, dan sarana prasarana pendidikan.

### 1.3. Sistematika Penyajian

Profil Pendidikan Kabupaten Magelang 2019 ini mengulas data pendidikan di Kabupaten Magelang berdasarkan indikator-indikator pendidikan yang terukur. Pembahasan utama dirinci ke dalam 3 bab sesuai tema statistik pendidikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan dan sistematika penyajian.
- Bab II menjelaskan tentang metologi yang digunakan dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang mencakup sumber data, konsep dan definisi.
- Bab III tentang partisipasi pendidikan yang meliputi pendidikan anak usia dini, partisipasi sekolah.
- Bab IV membahas tentang hasil-hasil pembangunan pendidikan yang antara lain dicerminkan oleh angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
- Bab V tentang sarana prasarana pendidikan meliputi, jumlah sekolah, guru, murid.

## BAB II METODOLOGI



Sumber data utama dari penulisan Profil Pendidikan Kabupaten Magelang 2019 ini adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018 dan 2019

## BAB II METODOLOGI

### 2.1. Sumber Data

Sumber data utama dari penulisan Profil Pendidikan Kabupaten Magelang 2019 ini adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018 dan 2019. Sumber data yang lain adalah data sekunder dari instansi Kemendiknas yang membawahi sekolah negeri dan Kemenag yang membawahi sekolah swasta, yang meliputi jumlah guru, jumlah murid dan jumlah fasilitas sekolah.

### 2.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data Susenas dilakukan dengan mendatangi langsung rumah tangga terpilih dan melakukan wawancara secara langsung antara petugas pencacah dengan responden, melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui tentang karakteristik rumah tangga yang ditanyakan.

### 2.3. Metode Analisis

Gambaran umum tentang keadaan pendidikan masyarakat disajikan dengan metode analisis sederhana dan deskriptif terhadap tabel-tabel yang tersedia dan disajikan dalam publikasi ini.

## 2.4. Konsep Definisi

Konsep, definisi dan penjelasan teknis dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan mempermudah memahami data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini.

- a) **Pendidikan formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat dan PT.

**Pendidikan nonformal** adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Paket A/B/C).

**Pendidikan formal maupun non formal** yang dimaksud disini adalah yang berada dibawah pengawasan Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemdikbud) maupun kementerian lainnya.

**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

- b) **Tidak/belum pernah sekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk yang tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
- c) **Masih bersekolah** adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C), baik yang berada dibawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Agama (Kemenag),

Instansi Negeri lain maupun Instansi swasta. Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

**d) Partisipasi Pendidikan**

**Angka Partisipasi Sekolah (APS)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.

**Angka Partisipasi Murni (APM)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

- **APM SD** merupakan persentase jumlah penduduk pada kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di Sekolah Dasar dan sederajat (SD) terhadap jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia 7-12 tahun.
- **APM SMP** merupakan persentase jumlah penduduk pada kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan sederajat (SLTP) terhadap jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia 13-15 tahun.
- **APM SMA** merupakan persentase jumlah penduduk pada kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan sederajat (SMA/K) terhadap jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia 16-18 tahun.

**e) Angka Partisipasi Kasar (APK)** adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan

tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

- APK SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di Sekolah Dasar dan sederajat (SD) terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
  - APK SLTP merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan sederajat (SLTP) terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun.
  - APK SMU/K merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di Sekolah Menengah Umum/ Kejuruan dan sederajat (SMU/K) terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun.
- f) **Angka Melek Huruf** adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin, huruf Arab, atau huruf Lainnya.
- g) **Tamat sekolah** adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.
- h) **Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.
- SD/MI meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.
  - SMP/MTs meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan sederajat.

- SM/MA meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) dan sederajat.
  - Perguruan Tinggi (PT) meliputi jenjang pendidikan pada Perguruan Tinggi baik Diploma I/II/III, DIV/S1, S2, S3 dan sederajat.
- i) **Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling/MYS*)** adalah Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)
- j) **Tingkat Partisipasi Sekolah** merupakan salah satu ukuran untuk menentukan seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan.
- Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun merupakan salah satu ukuran untuk menentukan seberapa banyak penduduk usia 7-12 tahun yang memanfaatkan fasilitas pendidikan.
  - Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun merupakan salah satu ukuran untuk menentukan seberapa banyak penduduk usia 13-15 tahun yang memanfaatkan fasilitas pendidikan.
  - Partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun merupakan salah satu ukuran untuk menentukan seberapa banyak penduduk usia 16-18 tahun yang memanfaatkan fasilitas pendidikan.

## BAB III PARTISIPASI SEKOLAH

### 2019



**SD/MI**

**APK : 109,14**

**APM : 98,97**

**SMP/MTS**

**APK : 91,08**

**APM : 78,02**

**SMA/MA**

**APK : 70,56**

**APM : 55,75**

**PT**

**APK : 17,62**

**APM : 14,00**

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa, berapapun umurnya, yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut

Angka partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut.

## BAB III

### PARTISIPASI PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya anak-anak namun semua orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah misalnya pada tahun 1994 pemerintah telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun. Dengan semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik dan tentunya akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk. Selain itu, pada tahun 2000 pemerintah Indonesia juga mencanangkan program Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau Education For All (EFA), sebagai upaya lain dalam meningkatkan pendidikan.

Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta pendidikan lain yang sederajat. Keberhasilan pendidikan pada tingkat dasar akan meningkatkan partisipasi pendidikan pada

tingkat menengah, dan memperkuat daya saing untuk meningkatkan kualitas hidupnya ketika dewasa.

Indikator partisipasi sekolah digunakan untuk memantau program pendidikan yang telah digulirkan pemerintah. Partisipasi sekolah menggambarkan efektifitas program pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan yang ada di masyarakat. Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektifnya suatu program. Hasil Susenas 2019 memperlihatkan hasil perhitungan berbagai indikator partisipasi sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, di antaranya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS.

### **3.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini menitikberatkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), osio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai

dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No. 20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD penyelenggaraannya di beberapa Negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun (masa emas).

**Tabel 3.1 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah dan Kelompok Umur di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2019 (%)**

No	Kegiatan	Umur 0-2		Umur 3-4		Umur 5-6	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	Pernah/sedang mengikuti pendidikan pra sekolah	1,37	0,73	23,37	27,36	90,7	96,18

Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2018-2019)

Anak pada kelompok umur 0-2 tahun pada tahun 2018 tercatat sebanyak 1,37 persen yang pernah/sedang mengikuti pendidikan pra sekolah dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 0,73 persen. Pada kelompok umur 3-4 tahun anak yang sedang dan pernah mengikuti pendidikan pra sekolah mengalami peningkatan yang cukup besar, dari 23,37 persen pada tahun 2018 menjadi 27,36 persen pada tahun 2019. Untuk kelompok umur 5-6 tahun anak yang pernah/sedang mengikuti pendidikan pra sekolah pada tahun 2018 sebesar 90,7 persen dan mengalami kenaikan menjadi 96,18 persen pada tahun 2019. Anak umur 3-4 pada tahun

2019 partisipasinya 27,36 persen ini artinya 3 dari 10 anak yang mengikuti pendidikan pra-sekolah, dapat diindikasikan bahwa minat untuk memberikan pendidikan formal pra sekolah pada usia tersebut belum begitu besar. Orientasi memberikan pendidikan pra sekolah lebih cenderung untuk mempersiapkan anak memasuki jenjang SD/MI daripada mencapai tujuan pendidikan anak usia dini itu sendiri.

**Tabel 3.2 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah di Kabupaten Magelang, 2018-2019**

Jenis Pendidikan Pra Sekolah	2018	2019
1	2	3
TK/RA/BA	80,29	77,83
Pos PAUD/PAUD Terintegasi Posyandu	18,97	19,65
Kelompok bermain	0,74	2,53
Taman Penitipan Anak	0	0

Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2018-2019)

Tabel 3.2 diatas memperlihatkan bahwa persentase tertinggi dari jenis pendidikan pra sekolah yang diikuti anak usia 0-6 adalah Taman Kanak-kanak/RA/BA yaitu sebesar 80,29 persen pada tahun 2018 dan menurun menjadi 77,83 persen pada tahun 2019, kemudian diikuti Pos PAUD/PAUD Terintegasi Posyandu sebesar 18,97 persen pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 19,65 persen pada tahun 2019.

Dari Tabel 3.2 juga terlihat untuk jenis pendidikan Kelompok Bermain pada tahun 2019 apabila dibandingkan tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup besar dimana pada tahun 2018 sebesar 0,74 persen menjadi 2,53 persen pada tahun 2019. Untuk jenis pendidikan taman penitipan anak pada tahun 2018 sebesar 0 persen dan tidak mengalami peningkatan pada tahun 2019.

Tidak adanya anak umur 0-6 yang sekolah di taman penitipan anak diimbangi dengan naiknya anak umur 0-6 tahun yang sekolah di kelompok bermain dan pos PAUD/PAUD terintegrasi posyandu. Menurunnya anak yang di tempat penitipan anak lebih ke beralih fungsinya taman penitipan anak menjadi PAUD maupun TK yang dalam kegiatannya tetap ada penitipan anak.

### **3.2 Partisipasi Sekolah**

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan system pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan mulai dari pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengecap pendidikan terutama pada tingkat dasar hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan. Salah satu program yang dilaksanakan adalah program pendidikan gratis pada tingkat dasar di seluruh wilayah Indonesia sehingga tidak ada hambatan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tersebut.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk menurut kategori partisipasi sekolah.

**Tabel 3.3 Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas dan Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2019**

Tahun	Jenis Kelamin	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Total
1	2	3	4	5	6
<b>2018</b>	Laki-laki	5,39	23,52	71,08	100
	Perempuan	8,95	21,88	69,17	100
	Laki-Laki + Perempuan	7,19	22,69	70,12	100
<b>2019</b>	Laki-laki	3,47	22,36	74,17	100
	Perempuan	6,76	20,34	72,90	100
	Laki-Laki + Perempuan	5,11	21,35	73,17	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2018-2019)

Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah pada tahun 2018 sebesar 7,19 persen, dan menurun pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,11. Penurunan persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Menurut jenis kelamin, pada tahun 2019 persentase penduduk usia 5 tahun keatas yang tidak/belum pernah sekolah untuk perempuan sebesar 6,76 persen lebih tinggi daripada laki-laki yang sebesar 3,47 persen. Pola yang sama untuk tahun 2018 dimana

penduduk umur 5 tahun ke atas berjenis kelamin perempuan lebih banyak persentasenya yang tidak/belum pernah bersekolah dibandingkan penduduk 5 tahun keatas berjenis kelamin laki-laki.

**Tabel 3.4 Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas dan Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2019**

Tahun	Kelompok Umur	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Total
1	2	3	4	5	6
<b>2018</b>	Umur 7-12	0,19	99,81	0	100
	Umur 13-15	2,3	96,78	0,92	100
	Umur 16-18	0	68,05	31,95	100
	Umur 19-24	0,27	15,54	84,19	100
<b>2019</b>	Umur 7-12	0,00	99,91	0,09	100
	Umur 13-15	0,00	97,41	2,59	100
	Umur 16-18	0,00	59,22	40,78	100
	Umur 19-24	0,11	17,74	82,15	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2018-2019)

Pada Tabel 3.4 terlihat bahwa persentase penduduk yang masih sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun (kelompok usia SD/MI) pada tahun 2019 sebesar 99,91 persen, kelompok umur 13-15 tahun (kelompok usia SMP/MTs) sebesar 97,41 persen, kelompok umur 16-18 tahun (kelompok usia SM/MA) sebesar 59,22 persen, dan kelompok umur 19-24 tahun (kelompok usia PT) sebesar 17,74 persen.

Dari data terlihat bahwa semakin tinggi kelompok usia sekolah semakin rendah tingkat partisipasi sekolahnya. Tabel 3.4

juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan persentase penduduk yang bersekolah di jenjang perguruan tinggi ditunjukkan dengan naiknya persentase penduduk usia 19 sampai 24 yang masih sekolah dari 15, 54 persen tahun 2018 menjadi 17,74 persen pada tahun 2019.

### 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu atau angka partisipasi sekolah (APS).

APS merupakan ukuran daya serap system pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Secara statistik APS adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah pada kelompok umur tertentu dengan jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu tanpa memperhatikan jenjang pendidikannya.

$$\text{APS 7-12 tahun} = \frac{\text{Jml pddk yg masih sekolah usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100$$

Catatan: kelompok usia sekolah (7-12, 13-15 tahun, 16-18 dan 19-24 tahun)

**Tabel 3.5 APS Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
Di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2019**

Tahun	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1	2	3	3	4
<b>2018</b>	Umur 7-12	99,66	100	99,81
	Umur 13-15	100	93,22	96,78
	Umur 16-18	68,96	67,05	68,05
	Umur 19-24	15,37	15,73	15,54
<b>2019</b>	Umur 7-12	99,83	100	99,91
	Umur 13-15	95,95	99,01	97,41
	Umur 16-18	65,71	70,83	68,36
	Umur 19-24	20,25	14,60	17,74

Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2018-2019)

Berdasarkan data Susenas 2018-2019, APS pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun relatif tinggi, lebih dari 95 persen. Pada Tahun 2019 APS pada kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,91 persen meningkat sebesar 0,10 persen jika dibandingkan pada tahun 2018 yang sebesar 99,81.

APS kelompok umur 13-15 pada tahun 2019 sebesar 97,41 meningkat dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 96,78 persen. Tingginya APS pada kedua kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15, menunjukkan keberhasilan pemerintah tentang wajib belajar sembilan tahun yang sudah dilaksanakan selama dua dekade terakhir. Untuk kelompok umur 16-18 dan 19-24 juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, pada kelompok umur 16-18 pada tahun 2018 sebesar 68,05 meningkat menjadi 68,35 persen pada tahun 2019 sedangkan kelompok umur 19-24 pada tahun 2018

sebesar 15,54 persen meningkat menjadi 17,74 persen pada tahun 2019.

Kecilnya persentase partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan diatas sekolah pertama lebih karena kesempatan untuk mengenyam pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi semakin terbatas, baik dalam hal akses, biaya maupun kemampuan akademis.

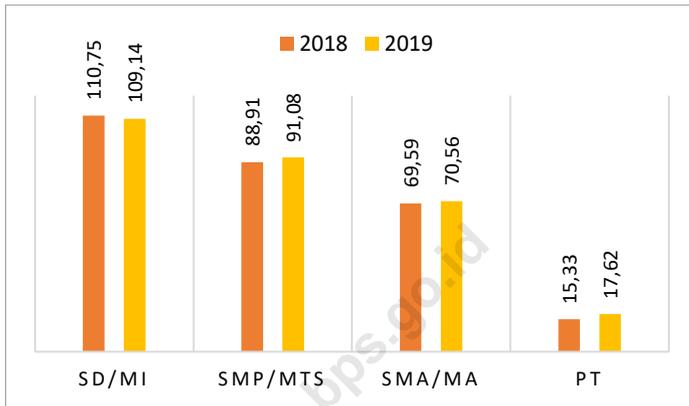
### **3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka partisipasi kasar merupakan rasio jumlah siswa, berapapun umurnya, yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah disuatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen. Hal ini disebabkan adanya siswa dengan umur lebih tua maupun umur muda dibanding umur standar di jenjang pendidikan tersebut. Kondisi ini menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding umur standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di umur yang lebih muda.

Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

**Gambar 3.1 Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2019**



Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2018-2019)

Perkembangan APK berbeda-beda untuk setiap jenjang pendidikan. Gambar 3.1 memperlihatkan terjadinya fluktuasi APK pada setiap jenjang pendidikan dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Pada tahun 2018 APK SD/MI sebesar 110,75 persen, menurun menjadi sebesar 109,14 persen pada tahun 2019. APK SMP pada tahun 2018 tercatat sebesar 88,91 persen, meningkat menjadi 91,08 persen pada tahun 2019. Sementara APK SMA/SMK/MA pada tahun 2018 sebesar 69,59 persen meningkat menjadi 70,56 persen pada tahun 2019. Untuk APK perguruan tinggi mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari 15,33 persen pada tahun 2018 meningkat menjadi 17,62 persen pada tahun 2019.

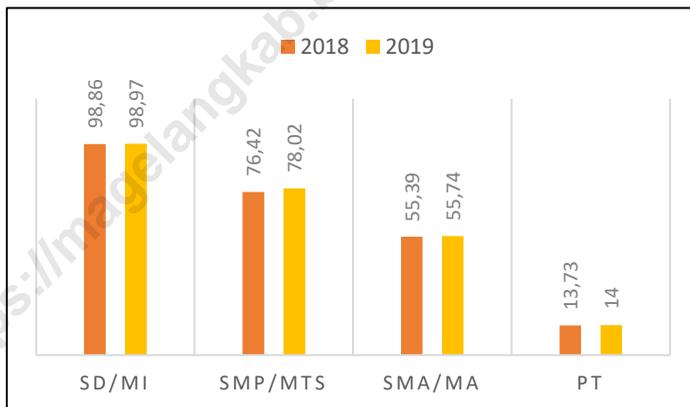
### 3.5 Angka Partisipasi Murni (APM)

Selain APS, indikator lainnya yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah

tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut.

Pengukuran APM bertujuan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Jika APM 100, berarti seluruh penduduk pada kelompok umur tertentu seluruhnya sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umur (bersekolah tepat waktu). Sebagai gambaran APM SD/MI adalah proporsi jumlah murid SD/MI yang berusia 7-12 tahun terhadap jumlah seluruh penduduk usia 7-12 tahun.

**Gambar 3.2. Angka Partisipasi Murni Di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2019**



Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2018-2019)

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 secara umum nilai APM untuk semua jenjang pendidikan kurang dari 100 persen. APM pendidikan cenderung semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan.

Pada tahun 2019 APM pada jenjang SD/MI sebesar 98,97 meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 98,86. Untuk APM pada jenjang SMP/MTs sebesar 78,02 persen pada tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 76,42 persen. Pada tingkat sekolah menengah atas APM SMA/MA pada tahun 2019 sebesar 55,74 meningkat dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 55,39. APM jenjang perguruan tinggi juga mengalami peningkatan dari 13,73 persen pada tahun 2018 menjadi 14 persen pada tahun 2019.

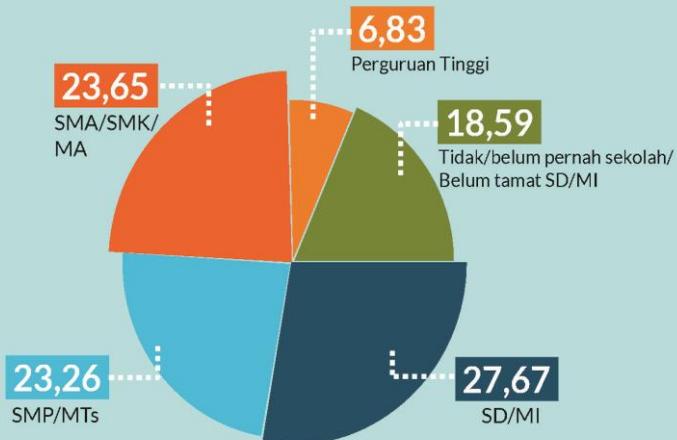
<https://magelangkab.bps.go.id>

# BAB IV PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2019



Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang sebesar 7,77 tahun 2019, artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Magelang usia 25 tahun ke atas hampir mengenyam pendidikan hingga kelas VIII atau setara dengan SMP kelas II

## Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke atas dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan



## BAB IV

# PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Pendidikan bermutu dalam pembangunan sebuah bangsa dapat melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Tanpa pendidikan yang bermutu tidak mungkin tujuan pembangunan sebuah bangsa dapat terwujud dengan baik. Pendidikan bermutu dan pembangunan berkualitas bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Strategi operasional untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui upaya pembangunan sektor pendidikan. Dengan demikian, pendidikan merupakan pilar strategis yang tidak bisa tergantikan oleh sektor manapun, sehingga isu pendidikan memiliki kedudukan yang strategis untuk selalu dikaji dan dikembangkan.

Untuk melihat hasil pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan alasan tidak/belum pernah sekolah/tidak sekolah lagi.

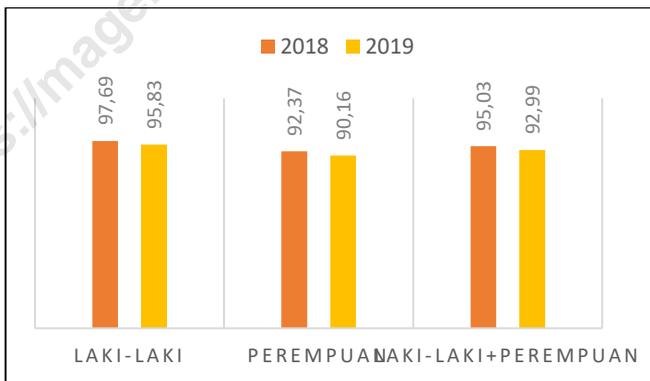
### 4.1 Angka Melek Huruf

Melek huruf adalah kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuin, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.

Angka melek huruf merupakan tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang beralih bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih mudah daripada melatih orang yang buta huruf. Kemampuan baca-tulis juga berarti peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi.

Pemberantasan buta huruf tidak dapat langsung dilaksanakan, namun memerlukan waktu dan perancangan program yang tepat. Berbagai program yang telah dilaksanakan dalam pemberantasan buta aksara diantaranya adalah kursus A-B-C, Program Pemberantasan Buta Huruf Fungsional, Kejar Paket A, dan program Keaksaraan Fungsional (KF) yang dijalankan oleh pemerintah sejak tahun 1995.

**Gambar 4.1. Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2019**



Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2018-2019)

Kondisi keaksaraan di Kabupaten Magelang ditunjukkan pada Gambar 4.1 yang menyajikan angka melek huruf penduduk

umur 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin tahun 2018-2019. Dari gambar 4.1 tersebut terlihat bahwa pada tahun 2019 persentase penduduk 15 tahun ke atas yang melek huruf sebesar 92,99 persen. Artinya masih ada 7,01 persen penduduk Kabupaten Magelang yang belum bebas aksara, persentase terbesar dipengaruhi oleh kelompok umur 45 tahun ke atas. Angka melek huruf tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 mengalami kenaikan penurunan sebesar 2,02 persen.

## 4.2 Rata-rata Lama Sekolah

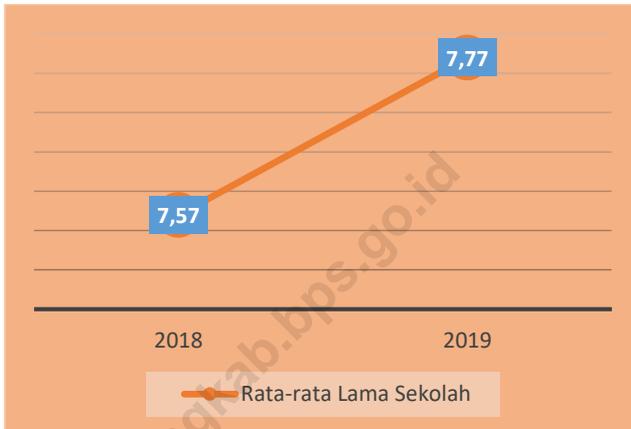
Salah satu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai adalah dengan Human Development Index (HDI) atau Indek Pembangunan Manusia (IPM). Komponen pembentuk indikator IPM ada 4 yaitu: Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama sekolah serta Pengeluaran per Kapita.

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variable pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Rata-rata lama sekolah yang digunakan dalam penghitungan IPM diukur dari penduduk berusia 25 tahun ke atas, karena pada usia tersebut proses belajar pada pendidikan formal telah berakhir.

Rata-rata lama sekolah (*mean yearsof schooling*) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih

cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan.

**Gambar 4.2 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (tahun) di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2019**



Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2018-2019)

Pada kurun waktu 2018 hingga 2019 angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pada tahun 2018 angka rata-rata lama sekolah 7,57 tahun meningkat menjadi 7,77 pada tahun 2019. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang memberi sinyal positif, bahwa penduduk Kabupaten Magelang mengalami peningkatan kesadaran untuk melanjutkan pendidikan.

Dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang sebesar 7,77 pada tahun 2019, artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Magelang usia 25 tahun ke atas hampir mengenyam pendidikan hingga kelas VIII atau setara dengan SMP kelas II.

### 4.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian atau keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Pendidikan tinggi yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan tinggi, cenderung mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan atau keahlian yang tinggi. Tingginya tingkat pendidikan juga dapat mencerminkan taraf intelegualitas suatu masyarakat.

Tabel 4.1 menggambarkan komposisi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin. Pada Tahun 2019 penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Magelang yang pendidikan tertinggi yang ditamatkan hingga jenjang SD/MI sebesar 27,67 persen, menurun dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 30,20 persen.

Untuk pendidikan tertinggi yang ditamatkan hingga jenjang SMP/MTs pada tahun 2019 sebesar 23,65 meningkat dibandingkan tahun 2018 yang besarnya 21,29 persen. Penurunan persentase penduduk yang pendidikan tertingginya di jenjang SD/MI dibarengi dengan peningkatan persentase penduduk yang berpendidikan tertingginya jenjang SMP/MTs keatas

**Tabel 4.1 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke atas dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2019**

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	2018			2019		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1	2	3	4	5	6	7
Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat SD/MI	16,33	25,85	21,19	14,29	22,88	18,59
SD/MI	31,62	28,83	30,20	28,02	27,31	27,67
SMP/MTs	22,14	20,48	21,29	22,32	24,20	23,26
SMA/SMK/MA	24,23	18,8	21,46	29,10	18,23	23,65
Perguruan tinggi	5,68	6,04	5,86	6,27	7,38	6,83

Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2018-2019)

. Pada tahun 2019 penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan setingkat SMA/SMK/MA mengalami peningkatan yang tinggi, dari 21,46 persen pada tahun 2018 menjadi 23,65 persen pada tahun 2019. Dari data tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tamat SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah keatas SMA/ sederajat.

Sementara itu, pada tahun 2019 untuk penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Magelang, pendidikan tertinggi yang ditamatkan hingga jenjang perguruan tinggi sebesar 6,83 persen meningkat dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 5,86 persen.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, pada tahun 2019 persentase perempuan yang belum/tidak pernah mengenyam pendidikan atau belum tamat SD sebesar 22,88 persen, lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang sebesar 14,29 persen. Persentase perempuan yang menamatkan pendidikan SMP/MTs ke atas (SMP/MTs, SM/MA, dan PT) sebesar 49,81 persen, lebih rendah dibandingkan laki-laki sebesar 57,69 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

# BAB V SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

## 2019



### SD/MI

Jumlah Sekolah

**916** unit

Rasio Guru-Murid

**1 : 15**

### SMA/SMK/MA

Jumlah Sekolah

**102** unit

Rasio Guru-Murid

**1 : 17**

### SMP/MTs

Jumlah Sekolah

**201** unit

Rasio Guru-Murid

**1 : 16**

## BAB V

# SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Kebijakan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP meliputi berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan yaitu pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan merupakan program utama pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan bangsa. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pendidikan antara lain jumlah fasilitas pendidikan, jumlah tenaga guru, rasio murid guru, rasio guru sekolah, dan rasio murid guru. Jumlah sekolah, guru dan murid yang dicakup di sini adalah sekolah jenjang pendidikan SD,SMP,SMA baik negeri maupun swasta yang berada dibawah Kemendiknas dan Kemenag dan data yang digunakan bersumber dari kedua instansi tersebut.

## 5.1 Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Guru

Semakin meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat di bidang pendidikan untuk setiap jenjang pendidikan hendaknya diiringi dengan meningkatnya fasilitas pendidikan. Hal ini tentu saja berkaitan dengan ketersediaan sekolah, terutama mengenai daya tampung ruang kelas sehingga program peningkatan kualitas manusia di bidang pendidikan dapat berjalan lancar. Di samping itu, kualitas dan kuantitas guru juga berperan dalam hal membangun kualitas pendidikan.

Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu prasyarat awal dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karenanya, merupakan hal yang penting untuk mendapatkan gambaran kondisi pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, agar kebijakan di bidang pendidikan khususnya di bidang sarana dan prasarana dapat lebih tepat arah dan tepat sasaran.

**Tabel 5.1 Jumlah Sekolah, Murid, Guru di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2019**

Pendidikan	Tahun	Sekolah	Murid	Guru
1	2	3	4	5
SD/MI	2018*	915	122.532	7.631
	2019	916	122.223	7.999
SMP/MTs	2018*	199	52.938	3.272
	2019	201	53.173	3.392
SMA/SMK/MA	2018*	101	39.303	2.262
	2019	102	40.862	2.445

\*) Perbaikan Data

Sumber: Kemendiknas dan Kemenag

Dari Tabel 5.1 terlihat bahwa pada tahun 2019, jumlah sekolah SD/MI (negeri dan swasta) sebanyak 916 sekolah dengan murid sebanyak 122.223 siswa dan guru sebanyak 7.999 orang. Untuk jumlah sekolah SMP/MTs (negeri dan swasta) sebanyak 201 sekolah dengan murid sebanyak 53.173 dan guru sebanyak 3.392. Di jenjang sekolah menengah atas jumlah sekolah SMA/SMK/MA (negeri/swasta) sebanyak 102 sekolah dengan murid sebanyak 40.862 murid dan guru sebanyak 2.445 guru. Dari tabel juga terlihat bahwa jumlah guru pada tahun 2019 untuk semua jenjang pendidikan mengalami kenaikan yang cukup besar. Untuk jumlah sekolah pada tahun 2019 mengalami peningkatan pada semua jenjang. Apabila dilihat angka kenaikan jumlah sekolah tidak seimbang apabila dibandingkan dengan kenaikan jumlah siswa.

## 5.2 Rasio Sekolah Guru, Sekolah Murid, dan Guru Murid

Indikator jumlah sekolah, jumlah guru maupun jumlah murid tentu saja tidak cukup mempunyai arti jika hanya berupa penjumlahan. Pada table 5.2 berikut akan ditampilkan rasio guru-murid, rasio sekolah-murid dan rasio sekolah-guru.

Rasio guru-murid adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi nilai rasionya, diduga akan semakin berkurang pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah.

Rasio sekolah-murid adalah Rasio murid per sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antar jumlah murid

dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan sekolah di suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio, berarti tingkat kepadatan sekolah makin tinggi. Pada umumnya terdapat suatu pola bahwa makin tinggi jenjang pendidikan makin padat jumlah murid di sekolah. Kondisi ini juga menunjukkan makin tinggi jenjang pendidikan, makin kurang jumlah sekolahnya.

Rasio sekolah-guru adalah Rasio Tenga pengajar per Sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah tenaga pengajar dibandingkan dengan jumlah sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui kekurangan/kelebihan tenaga pengajar yang mengajar di sekolah pada suatu daerah tertentu. Makin rendah nilai rasio, berarti makin terbatas juga jumlah tenaga pengajar yang mengajar di suatu sekolah tertentu.

**Tabel 5.2 Rasio Jumlah Sekolah, Murid, Guru di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2019**

Pendidikan	Tahun	S/G	S/M	G/M
1	2	3	4	5
SD/MI	2018	1:8	1:134	1:17
	2019	1:9	1:133	1:15
SMP/MTs	2018	1:16	1:266	1:14
	2019	1:17	1:265	1:16
SMA/SMK/MA	2018	1:22	1:389	1:17
	2019	1:24	1:401	1:17

Sumber : Kemendiknas dan Kemenag

Keterangan : S/G= Rasio Sekolah-Guru  
S/M= Rasio Sekolah Murid  
G/M= Rasio Guru Murid

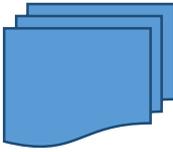
Selama 2 tahun terakhir, rasio guru murid untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA relatif stabil, pada tahun 2019, rasio SD/MI adalah 15, artinya setiap 1 orang guru mengampu 15 murid SD/MI. Rasio SMP/MTs sebesar 16 artinya setiap 1 orang guru mengampu 16 murid SMP/MTs, dan rasio SMA/SMK/MA sebesar 17 artinya 1 orang guru mengampu sebanyak 17 murid.

Dari Tabel 5.2 juga terlihat, pada tahun 2019 rata-rata setiap sekolah terdapat 9 guru pada jenjang sekolah SD/ sederajat, 17 guru pada jenjang sekolah SMP/ sederajat dan 24 guru pada jenjang pendidikan sekolah SMA/ sederajat. Rasio sekolah guru apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk jenjang SD, SMP dan SMA mengalami kenaikan.

Untuk rasio sekolah murid pada tahun 2019 setiap sekolah rata-rata menampung sebanyak 133 murid pada jenjang SD/ sederajat, 265 murid pada jenjang SMP/ sederajat, dan 401 murid pada jenjang SMA/ sederajat.

# BAB VI PENUTUP





## PENUTUP

Berdasarkan uraian tentang Profil Pendidikan Kabupaten Magelang tahun 2019 yang telah disajikan, maka dapat dirangkum beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pendidikan anak usia dini (PAUD) dimaksudkan untuk mengoptimalkan perkembangan masa keemasan anak (*the gold age*), Partisipasi PAUD untuk anak umur 5-6 tahun di Kabupaten Magelang pada tahun 2019 sebesar 96,18 persen.
2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun Kabupaten Magelang sebesar 99,91 persen. Hampir semua penduduk usia 7-12 tahun telah mengenyam pendidikan tingkat SD/MI.
3. Persentase perempuan yang menamatkan pendidikan SMP/MTs ke atas (SMP/MTs, SM/MA, dan PT) sebesar 49,81 persen, lebih rendah dibandingkan laki-laki sebesar 57,69 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Magelang tingkat pendidikan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.
4. Terjadi kenaikan yang tinggi pada jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang pendidikan tertingginya Perguruan Tinggi dari 5,86 persen pada tahun 2018 menjadi 6,83 persen pada tahun 2019.



Sensus  
Penduduk  
2020

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Soekarno - Hatta No 4 Kota Mungkid 58511  
Telp./Fax: (0293) 788143, E-Mail: [bps3308@bps.go.id](mailto:bps3308@bps.go.id)  
Homepage: <http://magelangkab.bps.go.id/>

ISBN 978-623-94353-1-8



9 786239 435318